



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.14, No.1, Juni 2017

TRANSFORMASI IDENTITAS KEINDONESIAAN

- Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru
- Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia
- Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) dalam Pemilu Pilkada DKI 2012
- Peranakan dan Serat Kekancangan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta
- Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan

RESUME PENELITIAN

- Peran Kerja sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN
- Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan

REVIEW BUKU

- Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 14	No. 1	Hlm. 1-108	Jakarta, Juni 2017	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Devi Darmawan, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

1829-8001
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru Aisah Putri Budiatri	1–15
• Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia Wasisto Raharjo Jati	17–29
• Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI): dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 Dina Fadiyah	31–44
• Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta Septi Satriani	45–54
• Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan Siswanto	55–68
Resume Penelitian	
• Peran Kerja Sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN Sandy Nur Ikfal Raharjo, dkk	69–83
• Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan Siswanto, dkk	85–98
Review Buku	
• Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan Anggi Afriansyah	99–106
Tentang Penulis	107–108
Pedoman Penulisan	109–113

CATATAN REDAKSI

Arus Globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perubahan tersebut bisa bernilai positif jika globalisasi dimaknai secara bijak. Namun tak sedikit dampak negatif ditimbulkan oleh globalisasi akibat ketidakmampuan kita dalam memaknai dan menanggapi secara bijak. Indonesia, tak lepas dari arus globalisasi ini sehingga pola-pola perilaku masyarakat di segala aspek kehidupan pun bergeser. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergeseran identitas manusia baik itu akibat sosial-budaya maupun politik.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan identitas Keindonesiaan. Artikel pertama yang ditulis oleh Aisah Putri Budiatri, "Dikotomi Identitas Keindonesiaan Dan Kepapuaan Pasca Orde Baru", memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Artikel berikutnya, "Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia". Artikel yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati ini membahas mengenai kelas menengah yang menjadi aktor baru dan menjadi identitas tersendiri dalam demokrasi di Indonesia. Tulisannya membahas mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Dan sejauh mana mereka ikut andil dalam proses demokratisasi di ruang publik. Sementara itu, artikel "Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara Dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012" yang ditulis oleh Dina Fadiah menawarkan diskusi mengenai relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-

Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas menjadi identitas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

Pergeseran identitas juga terjadi di Kraton Yogyakarta yang dibahas dalam artikel "Peranakan Dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta" yang ditulis oleh Septi Satriani. Artikel ini membahas bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Artikel terakhir membahas tentang "Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan" yang ditulis oleh Siswanto. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan

bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Selain kelima artikel terkait identitas di atas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama ditulis oleh Sandy Nur Iqbal Raharjo, “Peran Kerja Sama IMT-GT Dalam Pembangunan Konektivitas Asean”. Tulisan ini menganalisis arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim.

Artikel kedua, “Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan”, ditulis oleh Siswanto. Artikel ini mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerjasama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (asymmetric power relations) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (bargaining position) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (nasional power) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia

sebagai negara kekuatan menengah (middle power) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Fathur Rokhman & Surahmat “Bahasa Sebagai Arena Dan Instrumen Kekuasaan”. Review yang ditulis Anggi Afriansyah menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai identitas Keindonesiaan. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

DDC: 320.54 : 352.14

Aisah Putri Budiatri

DIKOTOMI IDENTITAS KEINDONESIAAN DAN KEPAPUAAN PASCA ORDE BARU

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 1-15

Narasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Kata kunci: identitas, Papua, kepapuaan, keindonesiaan, konflik, paska Orde Baru

DDC: 305.5

Wasisto Raharjo Jati

MEMAKNAI KELAS MENENGAH SEBAGAI AKTOR DEMOKRASI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 17-29

Tulisan ini hendak menganalisis mengenai kelas menengah sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Membicarakan kelas menengah dalam setiap diskursus ilmu sosial dan politik di Indonesia senantiasa dihadapkan pada pembahasan ekonomi secara kuantitatif. Hal yang perlu dicatat adalah keberadaan kelas menengah ini daripada didefinisikan lebih baik dirasakan keberadaannya dalam kehidupan. Posisi kelas menengah sebagai aktor politik di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan kemunculan kelas menengah dalam arus demokrasi Indonesia yang masih ambigu. Kelas menengah ini bisa menjadi kelompok masyarakat yang tersubordinasi dengan negara, namun di satu sisi, kelas menengah juga tampil sebagai kelas masyarakat yang resisten dengan negara. Adanya transisi posisi dan status kelas menengah tersebut sebenarnya bisa disimak dari gerakan reformasi 1998 hingga sekarang ini. Munculnya berbagai macam gerakan politik dengan mengarustamakan demokrasi yang diinisiasi oleh kelas menengah menjadi hal yang terelakkan pasca reformasi ini. Semula, gerakan tersebut hanya berupa aksi penyampaian aspirasi dan kini sudah berkembang menjadi menjadi aksi penuntutan representasi. Adanya perubahan dalam pilihan aksi dan strategi itu menandakan bahwa kesadaran politik di kalangan kelas menengah Indonesia sendiri sudah semikian merata. Mereka tidak hanya menjadi aktor pasif secara politis namun juga aktif dalam menyuarakan aspirasi dan sekaligus pula representasinya. Menguatnya aksi representasi dari kelas menengah ini merupakan implikasi penting semakin menguatnya ranah societal terhadap

proses political, dan semakin berperannya netizen dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana mereka andil dalam proses demokratisasi di ruang publik.

Kata kunci: Demokratisasi, Kelas Menengah, Masyarakat

DDC: 324.6

Dina Fadiyah

**KUASA MERAH SUARA: RELASI
FOKE-NARA DAN FORUM
KOMUNIKASI ANAK BETAWI
(FORKABI) DALAM PEMILUKADA
DKI JAKARTA 2012**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 31-44

Tulisan ini bermaksud melihat relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilu DKI Jakarta 2012. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-mana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

Kata kunci: Ormas, Forkabi, Patron, Klien

DDC: 302.3

Septi Satriani

**PERANAKAN DAN SERAT
KEKANCINGAN: SEBUAH
IDENTITAS ABDI DALEM KRATON
YOGYAKARTA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 45-54

Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Kata kunci : Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan

DDC: 320.509598

Siswanto

**TRANSFORMASI PANCASILA DAN
IDENTITAS KEINDONESIAAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 55-68

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin lama semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi

atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Kata kunci: Globalisasi, Identitas Keindonesiaan, Transformasi Pancasila

DDC: 327

Sandy Nur Ikfal Raharjo

PERAN KERJA SAMA IMT-GT DALAM PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS ASEAN

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 69-83

Indonesia-Malaysia—Thailand Growth Triangle (IMT-GT) merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang diakui oleh ASEAN berperan penting dalam membangun konektivitas ASEAN. Namun demikian, perbedaan karakter geografis dan perbedaan kepentingan antartiga negara anggotanya berpeluang menghambat implementasi IMT-GT dalam membangun konektivitas tersebut. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yaitu arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim. Melalui metode kualitatif bersifat deskriptif korelatif, studi ini menemukan bahwa IMT-GT berkontribusi hampir 50% bagi perekonomian Malaysia, mendukung visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia, serta mendorong kemajuan wilayah Thailand Selatan yang relatif tertinggal. Temuan lainnya, capaian program IMT-GT 2012-2016 masih rendah, terutama di sisi Indonesia akibat terlalu banyaknya program yang dicanangkan. Terakhir, IMT-GT berperan dalam membangun konektivitas ASEAN melalui pengembangan lima koridor ekonomi, walaupun masih lebih dominan pada dimensi darat dibanding dimensi maritim.

Kata kunci: ASEAN, IMT-GT, konektivitas, dan maritim

DDC: 327.51

Siswanto

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK: MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL DI TENGAH KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 85-98

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembarakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (*asymmetric power relations*) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (*nasional power*) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan. Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.

Kata kunci: Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional

DDC: 302.222

Anggi Afriansyah

**BAHASA SEBAGAI ARENA DAN
INSTRUMEN KEKUASAAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 99-106

Buku ini menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Kata kunci: bahasa, politik, kekuasaan, Indonesia

DDC: 320.54 : 352.14

Aisah Putri Budiatri

THE DICHOTOMY OF INDONESIAN AND PAPUAN IDENTITIES IN THE POST-NEW ORDER ERA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 1-15

The narratives about the dichotomy of Indonesian and Papuan identities are almost founded in every analysis of Papuan political identity. The previous research emphasis on the discussion about the Dutch colonial experience, the history of Papua's integration into Indonesia and the failure of development under New Order era as the key reasons for the genesis of the dichotomy. The colonial periode and New Order era have become their research focus since the Papuan identity as an antithesis of Indonesian-ness was born and grew under this political period. Then, how is about the political identities in Papua under Post-New Order? This article shows that the antithesis dichotomy between Papuan and Indonesian identities still occurs, even though several policies to resolve the conflict, including the Special Autonomy Law, have been implemented. In fact, the dichotomy of identities in Papua has sharpened and potentially worsened the conflict.

Keywords: *identity, Papua, Papuan-ness, Indonesian-ness, conflict, post-New Order*

DDC: 305.5

Wasisto Raharjo Jati

UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY

PILLAR IN INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 17-29

This article is aims to analyse middle class as one of the main actors in Indonesian democratization process. Discussion on middle class studies in Indonesian social and political science discourse have been dominated economic understanding based quantitative method. It was an academic challenges for Indonesian social scientist to redefine terminology of middle class. The position of middle class as the political actor in Indonesia still fluctuated due to unclearly standing in terms of relation state and society. On one hand, the middle class could perform as resistant groups against the political regime. In other hand, the Indonesian middle class presumably become subordinated groups towards the political regime. It can be indicated in Indonesia post Authoritarian era, the middle class groups performs itself as the political initiator from grass roots level. That main motivation from Indonesian middle class in recent political era are make alternative representation in order to articulate aspiration. The emergence of internet especially social media have been perceived as political machine that stimulated middle class to make critical points toward government today.

Keyword: *Democratization, Middle Class, Society.*

DDC: 324.6

Dina Fadiyah

UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY PILLAR IN INDONESIA

This paper intends to see the relationship between Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) with Forkabi in Jakarta 2012 Election. Basically, Forkabi stand up because they felt treat from immigrants. Forkabi originally founded on ethnicity but later transformed into a political extension of a local elite. CSOs that were supposed to be free of political interests, became the political extension of Foke-Nara during the campaign period in the 2012 Jakarta Governor election. This paper uses descriptive qualitative method and found that community organizations can play an important role in a local election. Proven with the local elites are currently aggressively used organizations as the tim to win the election. The success of this case because members of mass organizations are widespread everywhere. Starting from the level of RT, RW, Village, District, etc. This proves that the existing mass organizations can not be independent or do not have political interest.

Keywords: Mass Organization, Forkabi, Patron, Client.

DDC: 302.3

Septi Satriani

**PERANAKAN AND SERAT
KEKANCINGAN: AN IDENTITY OF
“ABDI DALEM” IN YOGYAKARTA
PALACE**

This paper focus on how the concept of peranakan and serat kekancingan became the identity of abdi dalem of Kraton Yogyakarta. Peranakan is not just a uniform but the symbol of brotherhood and control of behavior. I assume that the peranakan and serat kekancingan is a symbol of identity. When the abdi dalem wearing a peranakan and having serat kekancingan, they will behave according to the value that contained by them.

Keywords: Identity, Abdi Dalem in Yogyakarta Palace, Peranakan, Serat Kekancingan

DDC: 320.509598

Siswanto

**THE TRANSFORMATION OF
PANCASILA AND INDONESIAN
IDENTITY**

The ideology of Pancasila as the basis of the state and the worldview is increasingly abandoned by the Indonesian nation. Pancasila as a reference of political and social life is weakening in the midst of globalization that influence the mindset and behavior of the Indonesian people. Therefore, the people of Indonesia move to the condition that they lost of Indonesian Identity. This paper sees the importance of discourse about transformation of Pancasila, so that it is expected to be a solution to the challenge of nationality. Transfromasi Pancasila can be done through (1) Transformation is holistic, can not be partial. (2) Transformation also involves about changing the mindset of the community. (3) This transformation also needs to be grounded by the light of science.

Keywords: Globalization, Indonesia Identity, Transformation of Pancasila

DDC: 327

Sandy Nur Ikfal Raharjo

**THE ROLE OF IMT-GT
COOPERATION IN THE ASEAN
CONNECTIVITY DEVELOPMENT**

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) is recognized as one of the sub-regional cooperation to support ASEAN Community. However, geographical character differences and consequently creating different interests among three member states, is likely to hinder the implementation of the IMT-GT in establishing such connectivity. This study focuses on three issues, namely, the significance of IMT-GT for each member state, implementation of IMT-GT's programs in 2012-

2016, and the role of IMT-GT in building ASEAN connectivity, particularly in the maritime sector. Through correlative descriptive qualitative method, this study found that the IMT sub-region contributes nearly 50% for the Malaysian economy, supports the Indonesian vision of Global Maritime Fulcrum for Indonesia, as well as encourages the development of less-developed Southern Thailand region. In Addition, the implementation of IMT-GT's programs in 2012-2016 was still low, especially on the side of Indonesia due to too many programs were planned. Another finding was that IMT-GT has played significant role in building the ASEAN connectivity through the development of five economic corridors, although it was still more on land connectivity rather than maritime connectivity.

Keywords: ASEAN, IMT-GT, connectivity, and maritime

DDC: 327.51

Siswanto

**INDONESIAN FOREIGN POLICY
TOWARD CHINA:
FIGHTING THE NATIONAL
INTERESTS IN ASYMMETRIC
POWER RELATIONS**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 85-98

This paper would like to describe Indonesia's foreign policy towards China in the Reform period. As we known that Indonesia-China bilateral relations have been going on since the 1950s. The relations have ups and downs condition in accordance with the dynamics of domestic politics of each country. It is exciting that in Reform period that bilateral cooperation has been increasing especially in the field of politics and economy. In other hand, there is obstacle in this bilateral cooperation. The cooperation based on imbalance power relation (asymmetric power relations) which will affect to the bargaining position of each country in struggling for national interests. China as a nation with greater national power will be easier in fighting for its national interests compared to Indonesia as a country with smaller national power. To solve the obstacle, Indonesia's position as a middle power country can be a strategic instrument in facing China. Position as an middle power is based on a number of identifications of its capacity and political behavior in international relations

such as ; a diplomatic initiator in realizing stability / security and peace in the region. Finally, in closing remark that this paper is expected to give input to the direction of Indonesian foreign policy towards China so that it has more bargaining position in fighting its national interests against China in the midst of imbalance power (asymmetric power relations)

Keywords: Foreign policy, power imbalance, national interest

DDC: 302.222

Anggi Afriansyah

**LANGUAGE AS FIELD AND
INSTRUMENTS OF POWER**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 99-106

This book examines the use of language in variety aspects of life. Language is not only used as a medium of communication but more than that, can be an effective tool to gain power. Language operates as an instrument of power and successfully utilized optimally by those who have the intention to to get power. Language can be used to dominate others, means of struggle, preserve power, won the election, and achieve economic benefits.

Keywords: Language, politic, power, Indonesia

**PERANAKAN DAN SERAT KEKANCINGAN:
SEBUAH IDENTITAS ABDI DALEM KRATON YOGYAKARTA**

**PERANAKAN AND SERAT KEKANCINGAN:
AN IDENTITY OF "ABDI DALEM" IN YOGYAKARTA PALACE**

Septi Satriani

Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: septisatriani@gmail.com

Diterima: 10 Maret 2017; direvisi: 18 April 2017; disetujui: 6 Juni 2017

Abstract

This paper focus on how the concept of peranakan and serat kekancingan became the identity of abdi dalem of Kraton Yogyakarta. Peranakan is not just a uniform but the symbol of brotherhood and control of behavior. I assume that the peranakan and serat kekancingan is a symbol of identity. When the abdi dalem wearing a peranakan and having serat kekancingan, they will behave according to the value that contained by them.

Keywords: Identity, Abdi Dalem in Yogyakarta Palace, Peranakan, Serat Kekancingan

Abstrak

Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Kata Kunci: Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan

Pendahuluan

Mudik lebaran pada tahun 2012 menjadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena saya sudah mengantongi kepastian mendapat beasiswa untuk menempuh S2 di bidang Antropologi di kota kelahiran saya-Yogyakarta. Kesempatan inipun tidak saya sia-siakan karena setelah tujuh tahun tinggal di Ibukota Negara baru kali ini saya bisa Sholat Ied bareng dengan keluarga besar di Alun-alun Utara. Hal ini bukan karena tiadanya kesempatan untuk mudik di tahun-tahun sebelumnya tetapi karena ada kalanya saya harus berbeda dengan keluarga dalam memasuki hari raya lebaran. Kebetulan suami saya adalah

warga Nahdliyin¹ sementara keluarga besar saya adalah warga Muhammadiyah.² Kebahagiaaan

¹ Nahdliyin sebutan untuk warga Islam yang menjadi pengikut NU. NU kepanjangan dari Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama) sebuah organisasi yang beridiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini maka KH. Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar) kemudian juga dirumuskan kitab I'tiqah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kitab ini kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU dan dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang social, keagamaan dan politik. <http://www.nu.or.id/about/paham+keagamaan>, diakses pada 5 April 2016.

² Pendiri Muhammadiyah adalah KH. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad. Gerakan Muhammadiyah bertujuan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. <http://www.muhammadiyah.or.id/>

saya semakin lengkap manakala selepas Sholat Ied kami berkesempatan untuk bisa melihat lebih dekat perayaan *Garebeg* Idul Fitri yang perayaannya bersamaan dengan jatuhnya 1 Syawal 1433 H. Ada saatnya Kraton Yogyakarta memilih mengadakan perayaan *Garebeg* Idul Fitri maupun Idul Adha sehari sebelum atau sehari setelah Sholat Ied dilaksanakan. Peristiwa-peristiwa ini membuat saya berefleksi bahwa hidup di Indonesia sekaligus Yogyakarta membuat saya semakin sadar bahwa sebagai orang Islam kami memiliki cara yang berbeda dalam menetapkan perayaan hari besar agama kami yang mungkin jarang ditemui oleh penganut agama lain di Indonesia.

Ada pemandangan menarik yang saya lihat pada perayaan *garebeg* waktu itu. *Garebeg* ini adalah *garebeg* yang kedua³ yang pernah saya lihat. Para *abdi dalem* dengan kusyu⁴ menunggu di regol *brajanala* dan dengan sigap segera membukanya ketika iring-iringan sepuluh *bergodo* (prajurit) dan rombongan pembawa *garebeg* ke luar dari *kemandhungan lor* menuju *siti hinggil* hingga ke *pangelasan* dan terus menuju ke alun-alun utara untuk memasuki masjid besar.⁴ Mereka mengenakan pakaian *sorjan*⁵ berwarna biru tua dengan kain *jarik*⁶ yang *diwiru engkol*.⁷ Belakangan saya

content-44-det-tentang-muhammadiyah.html, diakses pada 5 April 2016.

³ Pertama kali saya melihat *garebeg* adalah ketika masih berumur 6 tahun. Waktu itu saya dibawa Bude (kakak kandung Bapak) untuk melihat *garebeg* di Alun-alun Utara.

⁴ KRT. Wasesowinoto. *Permati Tata Lampah-tata Rakit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Pasowan-Parakan Padintenan Jilid 1*. (2008), hlm. 11.

⁵ *Sorjan* merupakan pakaian tradisi orang Jogja. Pakaian ini memiliki lengan panjang dan krah sanghai atau tegak yang menutupi leher secara keseluruhan. Di krah bagian tengah terdapat kancing baju yang terletak secara vertikal dari atas ke bawah. Biasanya kancing baju tersebut dibungkus dengan kain yang sama dengan baju *sorjan* tersebut.

⁶ *Jarik* adalah kain panjang bermotif batik. Kain ini biasanya digunakan oleh laki-laki dan perempuan ketika mengenakan pakaian tradisional. Cara menggunakan kain ini dililitkan di pinggang dan diikat dengan menggunakan bengkong atau lontong. Kain ini juga biasa digunakan oleh ibu-ibu untuk menggendong bayi.

⁷ *Diwiru* artinya dilipat sedemikian rupa sehingga membentuk garis lurus yang rapi. Biasanya kain yang *diwiru* diikat dengan penjepit di bagian bawah sehingga ketika pemakainya berjalan akan membentuk semacam kipas. *Engkol* artinya bentuk

baru tahu bahwa pakaian tersebut bernama *peranakan*. Pakaian yang biasa digunakan oleh para *abdi dalem* ketika berada di dalam Kraton Yogyakarta. Ketika saya mendekati mereka dan bertanya seputar perayaan tersebut, mereka mempersilakan saya untuk bertanya kepada *abdi dalem* yang lebih senior yang berhak menjawab pertanyaan saya. Peristiwa ini kemudian memicu rasa penasaran. Siapa sebenarnya *abdi dalem*? Bagaimana mereka bisa menjadi *abdi dalem* dan apa tugasnya? Mengapa mereka harus mengenakan *peranakan* ketika masuk ke dalam Kraton Yogyakarta?

Dengan menggunakan data yang sama dalam tesis saya, saya ingin melihat keberadaan *abdi dalem* dan *peranakan* dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Jika sebelumnya dalam tesis saya, keberadaan *abdi dalem* dan *peranakan* adalah bagian dari bagaimana Sultan merespon perubahan arena yang ada di tingkat nasional dan lokal dengan menggunakan perspektif Bourdieu maka dalam tulisan ini saya ingin melihat dengan menggunakan perspektif Foucault.

Governmentality Foucault

Foucault berpendapat bahwa sampai abad ke-18 masalah pemerintah lebih ditempatkan pada konteks umum. Untuk alasan inilah, Foucault mendefinisikan memerintah sebagai mengarahkan atau lebih tepatnya sebagai “arahan perilaku”.⁸ Dengan kata lain ‘*the conduct of conduct*’ Foucault adalah bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membentuk, membimbing atau mempengaruhi perilaku seseorang atau orang.⁹ Disini Gordon menambahkan bahwa memerintah sebagai kegiatan yang menyangkut hubungan antara diri dengan diri, hubungan interpersonal swasta yang melibatkan beberapa bentuk kontrol atau bimbingan, hubungan dengan lembaga-lembaga sosial dan masyarakat dan

wiru dengan garis yang lebih lebar dan lipatan paling depan berbentuk zig zag.

⁸ Lihat: Thomas Lemke, “The Birth of Bio-Politics” – Michel Foucault’s Lecture at the Collège de France on Neo-Liberal Governmentality, *Economy & Society*, Vol 30. No. 2, (2001), hlm. 190-207.

⁹ Colin Gordon, “Governmental Rationality: an Introduction”, dalam Graham Burchell/Colin Gordon/Peter Miller (eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm.2

hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan politik.¹⁰ Foucault menggunakan rasionalitas memerintah bergantian dengan seni memerintah. Memerintah adalah kegiatan atau praktik atau seni memerintah untuk mengetahui kegiatan apa yang mungkin akan dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukan. Dengan demikian rasionalitas memerintah berarti cara atau sistem berpikir tentang praktik pemerintahan (siapa yang mengatur, apa yang akan diatur, siapa dan apa yang akan diatur). Dari sini akan muncul beberapa bentuk kegiatan yang mudah dipikirkan dan mudah dipraktikkan dan kepada siapa ini akan dipraktikkan.¹¹

Foucault menunjukkan dalam masyarakat modern, pemerintahan dipahami sebagai teknik kekuasaan yang dirancang dari hasil mengamati, memantau dan bentuk mengontrol perilaku individu melalui berbagai institusi sosial dan ekonomi seperti sekolah maupun penjara.¹² Foucault berpendapat bahwa pemerintahan/kepengaturan adalah tentang bagaimana memerintah atau mengatur. Foucault menambahkan bahwa kedaulatan yang sah tidak bisa diandalkan sebagai sarana untuk menggambarkan kekuasaan karena kekuasaan yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan itu sendiri.¹³

Governmentality merupakan gabungan kata dari ‘mengatur’ (gubernur) dan mentalitas (mentalite). Di sini Foucault menekankan saling ketergantungan antara pelaksanaan pemerintahan (praktik) dengan mentalitas yang mendukung praktik-praktik ini. Dengan kata lain, *governmentality* dapat digambarkan sebagai upaya untuk menciptakan cara dimana berbagai teknik bisa dikembangkan untuk mengendalikan, menormalisasi, atau membentuk perilaku masyarakat. Untuk itu *governmentality* adalah konsep yang mengidentifikasi hubungan pemerintah Negara (politik) dan pemerintah diri (moralitas), pembentukan subjek (genealogi

subjek) dengan pembentukan negara (genealogi negara).¹⁴

Abdi Dalem

Data mengenai abdi dalem ini sebagian besar saya ambil dari tesis saya yang berjudul “Abdi Dalem Keprajan dalam Narasi Keistimewaan Yogyakarta”.¹⁵ Dalam literatur yang ada selama ini disebutkan hanya ada dua jenis abdi dalem yaitu punokawan dan keprajan (Haryanto 2014; Jati 2012; Hadiwijoyo 2014; Wasesowinoto 2006; Satriani 2011). Berdasarkan *Dawuh Dalem* angka 01/DD/HB.X/EHE-1932 tertanggal 29 Rejeb EHE 1932 atau 08 Nopember 1999 dikatakan bahwa”

“...Abdi dalem yaiku sopo wae pawongan kang ditetepake dadi Abdiningsung Abdine Budaya Ngayogyakarta Hadiningrat kanthi serat kekancingan kraton....”

“...Abdi dalem adalah siapa saja yang ditetapkan menjadi abdi budaya Yogyakarta Hadiningrat melalui surat keputusan Kraton...”

(KRT Adiwongso, pengageng Tepas Dwarapura).

Sementara KRT Adiwongso¹⁶ saat saya wawancara menekankan bahwa abdi dalem itu bukan *bature* (pembantu) Sultan. Sri Sultan HB X sangat mengerti bahwa timbul banyak pendapat mengenai keberadaan abdi dalem. Untuk menghindari permasalahan maka Sri Sultan HB X merumuskan kembali abdi dalem sebagai abdi budaya sehingga keberadaannya disesuaikan dengan kebudayaan Yogyakarta. Apalagi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, salah satu unsur keistimewaan adalah kebudayaan¹⁷. Jika dijabarkan lebih lanjut tutur KRT Adiwongso, konsep abdi kebudayaan itu diharapkan mereka bertingkah laku seperti abdi dalem.

¹⁴ Fimyar, 2008, hlm.5

¹⁵ Lihat: http://opac.lib.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=1000171&obyek_id=4, diakses pada 5 April 2016.

¹⁶ Untuk satu dan lain hal, nama narasumber dianonimkan.

¹⁷ Wawancara dengan KRT Adiwongso di Yogyakarta. 1 Oktober 2014.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.3

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid.*, hlm.4

¹³ *Ibid.*, hlm.7

Dalam Bab 1 Pasal 1 butir *Ta* (dibaca to)¹⁸ *dawuh dalem* angka 01/DD/HB.X/EHE-1932 tertanggal 29 Rejeb EHE 1932 atau 08 Nopember 1999 dikatakan abdi dalem adalah siapapun yang telah ditetapkan menjadi abadinya Kraton Yogyakarta dengan *serat kekancingan*. Dalam buku karangan Wasesowinoto (2006) disebutkan bahwa abdi dalem adalah:

“...*Abdi dalem puniko sok sintena tiyang ingkang sagah dados abdine budaya Ngayogyakarta Hadiningrat, sarta ditetepake kanthi serat kekancingan sih dalem makarya wenten ing papan ingkang wenten sesambetane kaliyan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dene abdi dalem reh keprajan enggeh puniko Abdi Dalem ingkang nampi bayar/gaji saking Kantor Kas Pamarintah. Abdi dalem reh keprajan minangka perangkat pemerintah, mapan makarya wenten jajaran Pemerintah Republik Indonesia.*

Dene abdi dalem reh keprajan kaparingan kalenggahan dilarasake kaliyan pangkat/golongan formal Pegawai Negeri Sipil (PNS). Abdi dalem reh keprajan ingkat taksih cepeng damel (PNS) sarta ingkang sampun purna damel (pensiun), kaparingan pangkat abdi dalem sepisanan boten langkung saking pangkat wedono (gangsal jungan). Paring sih dalem pangkat sapisanan puniki minangka palenggahan pangkat kangge nglarasake sarta sianu bab pranatan, tata lampah, unggah ungguh, suba sita, tata krama, tata busana, tata basa, sowan/marak salebeting Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kangge anggota Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Tentara Nasional Indonesia (TNI), saged kaparingan pangkat kalenggahan abdi dalem reh keprajan. Dene pangkate dilarasake kaliyan Pegawai Negeri Sipil (PNS)...”

“...*Abdi dalem* adalah siapa saja orang yang sanggup menjadi abdi budaya Yogyakarta, dan ditetapkan melalui surat keputusan serta melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan Kraton Yogyakarta. Sedangkan *abdi dalem keprajan* adalah *abdi dalem* yang menerima gaji dari kantor kas pemerintah. Abdi dalem keprajan merupakan perangkat pemerintah dan bekerja dalam jajaran Pemerintah Republik Indonesia.

¹⁸ Penomoran pada *dawuh dalem* ini menggunakan aksara Jawa *ha na ca ra ka*. Khusus untuk ayat dalam *dawuh dalem* in yang mengatur tentang abdi dalem berada di dalam bagian umum pasal 1 ayat 1 butir *Ta*.

Abdi dalem keprajan mendapatkan kedudukan disesuaikan dengan pangkat/golongan formal Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Abdi dalem keprajan* yang masih aktif menjadi PNS atau yang sudah purna tugas (pensiun), memperoleh pangkat *abdi dalem* pertama kali tidak lebih dari pangkat wedono (lima jungan). Pemberian pangkat pertama sebagai dasar untuk menyesuaikan serta belajar mengenai norma atau aturan, cara berjalan, sopan santun, cara berpakaian, cara berbicara/berkomunikasi, cara menghadap/berkunjung di dalam Kraton Yogyakarta.

Untuk anggota Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa mendapatkan pangkat kedudukan sebagai *abdi dalem keprajan*. Pangkatnya disesuaikan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)...”

Jika merujuk pada kutipan di atas memang abdi dalem adalah siapapun yang sanggup menjadi abdi budaya Kraton Yogyakarta dan ditetapkan dengan *serat kekancingan* serta melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan Kraton Yogyakarta. Sementara abdi dalem dalam sistem pelapisan masyarakat Yogyakarta di tahun 1900an disebut juga sebagai priyayi.¹⁹ yang merupakan pegawai pemerintahan yang diangkat dari rakyat biasa.²⁰ Fungsi abdi dalem di masa lalu adalah melaksanakan semua perintah Sultan yang disampaikan melalui kaum bangsawan. Tugas dan kewajiban dari abdi dalem adalah *ngemban dawuh dalem* atau melaksanakan perintah-perintah Sultan²¹ sebagai bentuk pelayanan terhadap sumber kekuasaan dalam Kesultanan Yogyakarta.²² *Abdi dalem* bertugas *ngayahi*²³, *nguri-uri*²⁴ dan menjaga eksistensi kraton

¹⁹ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 23.

²⁰ Ini pula yang menjadi pertanyaan penulis apakah posisi abdi dalem dalam masyarakat sekarang masih bisa dikategorikan dalam pelapisan yang sama dengan masyarakat jaman dahulu.

²¹ Soemardjan, 2009, hlm.23.

²² P.J. Suwamo, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hlm.57.

²³ Ngayahi berarti melaksanakan tugas.

²⁴ Nguri-uri artinya melestarikan atau memelihara.

Yogyakarta dengan ganjaran berupa *siti*²⁵ dengan ukuran *jung*.²⁶ Sementara itu dalam terminologi kamus bahasa Indonesia *abdi* berarti bawahan, pelayan, hamba atau budak tebusan dan *dalem* berarti rumah atau istana. Jika diterjemahkan secara bebas abdi dalem adalah orang yang mengabdikan hidupnya untuk menjadi pelayan di dalam rumah atau istana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Kraton dikatakan bahwa ada dua abdi dalem²⁷ yaitu punokawan dan *reh*²⁸ kepatihan.²⁹ Abdi dalem punokawan bertugas di wilayah *kutogoro/kutonegoro*, sementara abdi dalem *reh* kepatihan bertugas di wilayah *negaragung* (negeri) dan *mancanegara*.³⁰ Baik abdi dalem punokawan maupun *reh* kepatihan sama-sama melaksanakan pekerjaan Kraton Yogyakarta. Jika abdi dalem punokawan melaksanakan pekerjaan di dalam Kraton Yogyakarta (semacam departemen dalam negeri) sementara abdi dalem *reh* kepatihan melaksanakan pekerjaan di luar Kraton Yogyakarta (semacam departemen yang bertugas menjembatani Kraton dengan wilayah-wilayah di luar kraton). Ini pula yang kemudian membedakan tempat

²⁵ Siti artinya tanah

²⁶ Jung adalah ukuran yang digunakan Kraton untuk menetapkan besaran atau luas tanah yang diterima oleh para abdi dalem. Ada banyak versi mengenai besaran jung ini. Salah satu sumber berpendapat bahwa satu jung kurang lebih 1000 m² sementara yang sumber lain berpendapat satu jung kurang lebih 6000 m². Dikarenakan susah untuk mencari padanan besaran jung maka kata jung tetap digunakan untuk mempermudah penjelasan. Besaran jung yang diterima oleh abdi dalem tergantung pada pangkat dan golongan yang dimilikinya. Dalam sebuah literature yang ditulis oleh Soemarsaid Moertono dikatakan 1 jung sama dengan 4 bahu atau sekitar 23.386 meter persegi.

²⁷ Menurut penuturan narasumber yang penulis temui pembagian dua abdi dalem ini sudah ada sejak Panembahan Senopati. Jika mengacu pada konsep abdi dalem sebagai birokrasi pemerintahan seperti yang dituturkan oleh Soemarsaid maka konsep abdi dalem *reh* kepatihan atau keprajan ini telah ada sejak abad XVI. Lihat juga literatur yang ditulis HJ De Graaf tentang keberadaan abdi dalem yang duduk melingkar di depan regol istana ketika Jan Vos datang ke Kraton pada tahun 1624. Lihat: Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 144.

²⁸ Reh artinya wilayah.

²⁹ Wawancara dengan KRT WW di Yogyakarta. 16 April 2014.

³⁰ Wawancara dengan KRT WW di Yogyakarta. 18 April 2014.

pengambilan *kekucah*³¹ dimana abdi dalem punokawan mengambil *kekucah* di dalam Kraton sementara abdi dalem *reh* kepatihan di Kepatihan meskipun sumber dana sama-sama berasal dari Kraton Yogyakarta. Belakangan abdi dalem *reh* kepatihan ini berganti nama menjadi abdi dalem keprajan pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Abdi dalem punokawan adalah seseorang yang mendaftarkan diri secara langsung ke Kraton Yogyakarta untuk menjadi abdi dalem melalui jalur umum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kraton Yogyakarta yaitu memiliki kepandaian tertentu seperti menari, mendalang, memainkan gamelan dan sebagainya. Abdi dalem ini memiliki tugas pokok dan gaji sesuai dengan pangkat dan kedudukan (*kalenggahan*) dalam tata rakit pemerintahan Kraton Yogyakarta.

Para abdi dalem ini berhak mendapatkan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat dalam abdi dalem adalah *minggah pangkat ajeg* dan *minggah pangkat mirunggan*.³² *Minggah pangkat ajeg* didasarkan pada terpenuhinya bakti dan pekerjaan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sementara *minggah pangkat mirunggan* adalah kenaikan pangkat yang diberikan oleh Ngarso Dalem Inggang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Buwono X karena dipandang memiliki prestasi lebih dari kewajiban yang harus diemban sebagai abdi dalem sehingga mampu mengharumkan dan meluhurkan Kraton Yogyakarta. Meskipun pangkat dapat naik secara berkala maupun karena kebaikan Sultan tetapi dua pangkat tertinggi (bupati nayaka dan KPH) menjadi hak prerogatif Sri Sultan Hamengku Buwono X (*mirunggan*). Abdi dalem punokawan berhak mendapat '*kalenggahan*' dan menyandang gelar serta nama pemberian kerajaan yang diberikan kepada mereka.³³

Berbeda dengan punokawan, abdi dalem keprajan adalah abdi dalem yang berasal dari

³¹ Kekucah adalah upah atau gaji.

³² KRT Wasowinoto, *Lenggahe Abdi Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Minggu Pon 1 Besar Jumakhir 1938*, (2006), hlm. 3.

³³ KRT Wasowinoto, *Permati, Tata Lampah-tata Rakit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Pasowan Ngabekten Hageng* Jilid 2. (2004).

pegawai pemerintah.³⁴ Berdasarkan keterangan salah satu abdi dalem³⁵ keberadaan abdi dalem keprajan dipandang sebagai jalan tengah yang memungkinkan dalam menghadapi perubahan jaman. Para *abdi dalem keprajan* ini kemudian diharapkan mampu menyokong administrasi Kraton karena keahlian yang mereka miliki. Mereka dapat mengajukan gelar kepangkatan yang berlaku dalam sistem pemerintahan kerajaan. Dalam memberikan gelar kepangkatan kepada *Abdi dalem keprajan*, Kraton Yogyakarta berpijak pada sistem kepangkatan yang berlaku dalam sistem kepangkatan pegawai pemerintah RI. Jika seseorang mengajukan diri menjadi abdi dalem keprajan maka golongan yang dimiliki dalam jenjang kepangkatan pegawai pemerintah RI yang dijadikan pijakan untuk memberi pangkat dalam sistem kerajaan Yogyakarta. *Abdi dalem keprajan* tidak menerima gaji berkala seperti layaknya *abdi dalem punokawan*. Tidak juga *kalengguhan*.³⁶ Namun mereka berhak memiliki gelar dan nama pemberian dari Kraton Yogyakarta. Abdi dalem keprajan ini juga dilekati kewajiban mengikuti beberapa kegiatan seperti sowan yang terdiri dari *pasowanan padintenan*, *pasowanan Jamasi Kagungan Dalem Pusaka*, *Pasowanan Muludan*, *Pasowanan Ngabekten*, dan *Pasowanan murgan* (insidental).

Pasowanan bagi abdi dalem keprajan ini menjadi wujud ‘kepatuhan’ terhadap Kraton Yogyakarta. Pakaian yang digunakan sewaktu *pasowanan* adalah pakaian *peranakan* (kain jarik, sorjan lurik, lontong, keris). *Pasowanan* dilakukan secara bergilir dari hari Senin hingga Minggu dua kali setiap selapan hari. Satu kelompok sowan terdiri dari 30-40 abdi dalem. *Pasowanan* ini diharapkan mampu memberi kesan kepada dunia luar bahwa Kraton Yogyakarta masih eksis.³⁷ Kenaikan pangkat abdi dalem keprajan sama dengan abdi dalem punokawan yaitu dengan mendasarkan pada sikap dan perilakunya yang baik.³⁸ Khusus untuk mereka yang masih aktif

bekerja di instansi pemerintahan maka bisa mengajukan kenaikan pangkat setelah empat tahun dengan menyertakan prestasi (presensi) dari instansi yang bersangkutan di mana abdi dalem tersebut bekerja.

Peranakan dan Serat Kekancingan

Peranakan adalah pakaian resmi yang disyaratkan kepada setiap abdi dalem ketika mereka akan melakukan *pasowanan* di dalam Kraton Yogyakarta. Keberadaan *peranakan* tidaklah lepas dari *pasowanan*. Lantas apa sebenarnya *peranakan* itu. Apakah *peranakan* sekedar pakaian seragam bagi abdi dalem ataukah lebih dari itu?. Berdasarkan penuturan KRT Jatiningrat, konsep pakaian *peranakan* tidak lepas dari filosofi tentang persaudaraan. Menurut penuturannya, Kraton itu sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan yang disimbolkan dengan *golong gilig* atau bulat sempurna dan tidak ada sudutnya. Ini kemudian disimbolkan dalam pakaian para abdi dalem saat ini. Harapan atau simbol doa dari pakaian itu adalah para abdi dalem merasakan sesuatu yang lebih yaitu persaudaraan yang sangat mendalam.

Peranakan itu persaudaraan. *Peranakan* itu adalah bagian penting dalam tubuh seorang ibu (rahim). Tidak ada satupun orang yang lahir di dunia ini yang belum pernah lewat situ. Artinya satu saudara. Hal ini memperjelas arti *golong gilig* yang mengedepankan persatuan kesatuan ini. Disitu pakaian *peranakan* itu biru tua. Artinya dalam. Si pemakai mengenakannya secara mendalam. Polanya atau liriknya itu tiga empat tiga empat. Itu telupat. Lurik telupat itu seperti itu. Pakaian para abdi dalem itu lurik telupat artinya kewulu minongko perpat artinya dipersaudarakan antara satu dengan yang lain. Persaudaraan yang paling tinggi di sini adalah bersaudara dengan sultan. Maka sultan tidak pernah menganggap abdi dalem itu sebagai pembantu. Tetapi sebagai konco maka sebutannya satu dengan yang lain itu co. “saking pundi co”. “Saweg menopo co”. (KRT Adiwongso, *Pengageng Tepas Dwarapura*).

Konsep persaudaraan ini diambil sebagai filosofi dalam abdi dalem. Berdasarkan penjelasan KRT Adiwongso bahwa mereka masuk menjadi

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Pasowanan Ngabekten Hageng Jilid 2. (2004).

³⁴ Wawancara dengan KMT MRB di Yogyakarta.

³⁵ Wawancara dengan KMT MN di Yogyakarta.

³⁶ Menurut narasumber hal ini dikarenakan abdi dalem keprajan telah menerima gaji dari pemerintah.

³⁷ Wawancara dengan KRT WW di Yogyakarta. 21 April 2014.

³⁸ KRT Wasowinoto, *Permati, Tata Lampah-tata Rakit*

abdi dalem otomatis dijadikan ‘saudara’nya (kerabat) Kraton. Persaudaraan ini dibangun dalam nalar ‘*peranakan*’ atau rahim. Artinya bahwa para abdi dalem ‘dianggap’ lahir dari rahim yang sama. Konsep ini adalah bentuk strategi Sultan agar para abdi dalem yang sebenarnya berasal bukan dari rahim yang sama merasa dipersaudarakan dengan Raja dan antar mereka.

Dalam konsep kekerabatan di Jawa, istilah kerabat merujuk pada pertalian kekeluargaan yang ada dalam sebuah masyarakat. Biasanya sistem kekerabatan ini terbatas pada asas kegunaan yang nyata dalam pergaulan, pengenalan dan daya ingat seseorang serta tidak tergantung pada sistem normatif atau konsepsi sehingga wujud jaringan kekerabatan akan berbeda antara keluarga Jawa yang satu dengan lainnya.³⁹ Jika mengacu pada konsep sistem kekerabatan Jawa maka keberadaan persaudaraan ini dilakukan karena ada kegunaan yang bisa diraih dari sistem atau konsep ini.

Seperti halnya sistem kekerabatan pada umumnya, sistem kekerabatan Jawa juga mempunyai fungsi memberikan semacam identitas kepada warganya, serta meninggikan kedudukan sosial maupun gengsinya.⁴⁰ Di sini berarti abdi dalem melalui sistem persaudaraan yang dikondisikan oleh Kraton memiliki tujuan sebagai pembentuk sebuah identitas. Maka tidak heran Kraton juga membuat semacam bahasa tersendiri yang berlaku sebagai bahasa komunikasi para abdi dalem ketika berada di dalam Kraton. Namun dalam keseharian, tidak tertutup kemungkinan Bahasa *bagongan* juga mereka gunakan sebagai bahasa komunikasi di luar Kraton Yogyakarta. Kesimpulannya ketika seseorang menjadi abdi dalem, sebenarnya mereka sedang dipersaudarakan satu dengan yang lain serta dipersaudarakan dengan Kraton. Artinya ketika telah dipersaudarakan maka mereka juga wajib ‘tunduk’ pada segala perintah dan peraturan yang berlaku di Kraton Yogyakarta. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pakaian *peranakan* tidak sekedar identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta melainkan dia simbol

‘persaudaraan’ diantara para abdi dalem dan antara abdi dalem dengan Kraton Yogyakarta. Dengan mengenakan pakaian *peranakan* maka abdi dalem dilekati hak dan tanggung jawab yang menyertai pakaian *peranakan* tersebut.

Serat kekancingan adalah semacam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kraton Yogyakarta. Biasanya dalam *serat kekancingan* terdapat informasi mengenai mengapa *serat kekancingan* tersebut dikeluarkan, ditujukan kepada siapa *serat kekancingan* tersebut dan konsekuensi yang ditimbulkan dari diterimanya *serat kekancingan* tersebut. *Serat kekancingan* ini bersifat legal dan mengikat penerima *serat kekancingan*. Seperti misalnya dalam hal hak untuk menggunakan tanah milik Kraton Yogyakarta. Si penerima hak sebelumnya harus mengantongi *serat kekancingan* sebagai membuktikan bahwa memang dia adalah benar yang ditunjuk oleh Kraton Yogyakarta sebagai pemegang hak untuk menggunakan tanah milik Kraton Yogyakarta. Terkait dengan abdi dalem, maka *serat kekancingan* ini menjadi bukti bahwa yang namanya tertera dalam *serat kekancingan* tersebut adalah benar abdi dalem dengan nama tertentu dan berhak menerima gelar tertentu dan konsekuensi tertentu pula.

Peranakan dan Abdi Dalem Kraton Yogyakarta: Sebuah Bentuk ‘Kepengaturan’

Foucault menunjukkan dalam masyarakat modern, pemerintahan dipahami sebagai teknik kekuasaan yang dirancang dari hasil mengamati, memantau dan bentuk mengontrol perilaku individu melalui berbagai institusi sosial dan ekonomi seperti sekolah maupun penjara.⁴¹ Foucault berpendapat bahwa pemerintahan/kepengaturan adalah tentang bagaimana memerintah atau mengatur. *Governmentality* merupakan gabungan kata dari ‘mengatur’ (gubernur) dan mentalitas (mentalite). Di sini Foucault menekankan saling ketergantungan antara pelaksanaan pemerintahan (praktik) dengan mentalitas yang mendukung praktik-praktik ini. Dengan kata lain, *governmentality* dapat digambarkan sebagai upaya untuk menciptakan cara dimana berbagai

³⁹ Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 153.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 154.

⁴¹ Colin Gordon, 1992, hlm. 4.

teknik bisa dikembangkan untuk mengendalikan, menormalisasi, atau membentuk perilaku masyarakat.

Dalam kaitannya dengan abdi dalem, *serat kekancingan* adalah semacam legalitas yang menandakan bahwa abdi dalem adalah bagian dari warga Kraton Yogyakarta. Melalui *serat kekancingan*, Kraton Yogyakarta berhak mengatur, memantau dan mengontrol para abdi dalem. *Serat kekancingan* ini menjadi dasar kepengaturan bagi abdi dalem. Artinya hak dan tanggung jawab yang harus diemban oleh abdi dalem tergantung pada posisi *kalenggahan* masing-masing abdi dalem. Dan melalui *serat kekancingan* ini pula abdi dalem berhak menyandang gelar, nama pemberian, *kekucah*, dan *kalenggahan* yang mencerminkan pangkat dan posisi abdi dalem dalam struktur yang ada dalam Kraton Yogyakarta. Sementara tanggung jawab yang harus diemban abdi dalem adalah bertindak sebagai abdi budaya. Artinya mereka adalah orang yang mengabdikan hidupnya untuk menjadi ‘penjaga’ budaya Kraton Yogyakarta yang mampu *ngayahi* dan *nguri-nguri* budaya Kraton Yogyakarta.

Selain itu tugas abdi dalem adalah *sowan* untuk menunjukkan rasa bakti mereka terhadap Kraton Yogyakarta. Kehadiran dan kerajinan dalam *sowan* menjadi salah satu parameter untuk kenaikan pangkat dan *kalenggahan*. Mereka bertugas *sowan* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh *pranatan* yang ada. Di sini kehadiran abdi dalem dalam melakukan *sowan* akan dicatat dan diurus oleh *tepas dwarapura* dan *tepas parintah ageng*.⁴² *Sowan* ini menjadi semacam wahana untuk memantau dan mengontrol abdi dalem. Ketika mereka rajin hadir untuk *sowan* maka mereka berhak untuk naik *kalenggahan*. Begitu juga sebaliknya. Kenaikan *kalenggahan* menjadi wujud kenaikan posisi mereka dalam struktur abdi dalem yang dibangun oleh Kraton Yogyakarta. Misalnya seseorang yang memiliki posisi *bupati nayaka* berhak menyandang gelar Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) untuk orang awam atau Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) untuk mereka yang memiliki

silsilah keturunan darah biru/bangsawan. *Pranata kalenggahan* ini menjadi dasar bagi Kraton Yogyakarta dalam menentukan posisi dan nama pemberian bagi abdi dalem. Selain itu posisi *kalenggahan* ini menjadi rujukan bagi Kraton Yogyakarta dalam memberikan tugas pada abdi dalem. Seperti misalnya ketika tugas *pariden* (menyerahkan *garebeg*) ke kepatihan atau ke puro pakualaman, Kraton Yogyakarta mensyaratkan hanya abdi dalem dengan posisi *kalenggahan* tertentu (misalkan bupati ke atas) yang berhak melaksanakan.

Selain *serat kekancingan*, *peranakan* adalah wahana lain yang digunakan Kraton Yogyakarta untuk mengendalikan, menormalisasi, atau membentuk perilaku abdi dalem. *Peranakan* menjadi dasar bagi Kraton Yogyakarta untuk ‘mempersaudara’ para abdi dalem yang tidak memiliki hubungan darah dengan Kraton Yogyakarta. Apalagi konsep keluarga dalam masyarakat Jawa berfungsi memberikan semacam identitas kepada warganya, serta meninggikan kedudukan sosial maupun gengsinya. Masuknya para abdi dalem dalam lingkaran persaudaraan dengan Kraton Yogyakarta menjadi semacam legalitas bagi Kraton Yogyakarta untuk mengendalikan, menormalisasi, atau membentuk perilaku abdi dalem.

Para abdi dalem juga diberi kesempatan untuk belajar mengenai *wewangunan* maupun *pangertosan* Kraton Yogyakarta, membaca dan menulis huruf Jawa maupun berbagai *lampah-lampah* selama mereka *sowan* dengan mengenakan *peranakan*. Pembelajaran ini adalah bagian menularkan berbagai tradisi, norma, etika dan nilai kepada abdi dalem agar mereka berperilaku sesuai dengan tradisi, norma, etika, dan nilai yang berlaku. Ketika berbagai tradisi, norma dan perilaku ini terus terpelihara dengan jalan diajarkan, ditularkan dan dilaksanakan kepada mereka-mereka yang tergabung dalam abdi dalem maka ini menjadi salah satu alat ‘pendisiplinan’ atau ‘pengontrol’ bagi abdi dalem untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan tradisi, norma, etika dan nilai yang selama ini telah diajarkan kepada mereka.

⁴² Semacam bagian dalam struktur Kraton Yogyakarta yang mengurus abdi dalem keprajan (*dwarapura*) dan abdi dalem punokawan (*parintah ageng*).

Pranatan Kalenggahan Angka 01/Pran/KHPP/XII/2004
Bab Pangkat Abdi Dalem
15 Dulkaidah Wawu 1937 Suryo Kaping 27 Desember 2004

Urutan	Pangkat	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		POLRI	TNI
		Pangkat	Gol		
1.	1. KPH			Jendral	Jendral
2.	2. Bupati Nayaka	Pembina Utama	IV/e	Komjen	Letjen
3.	3. Bupati Kliwon	Pem. Utm. Mad	IV/d	Irjen	Mayjen
4.	4. Bupati Sepuh	Pem. Utm. Mud	IV/c	Bridjen	Brigjen
5.	5. Bupati Anom	Pembina I	IV/b	Kombes	Kolonel
		Pembina	IV/a	AKBP Kompol	Letkol Mayor
6.	6. Riyo Bupati Anom	Penata I	III/d	AKP	Kapten
		Penata	III/c	Iptu Ipda	Lettu Letda
7.	7. Wedono	Penata Muda I	III/b	Aiptu	Pem. Lettu
		Penata Muda	III/a	Aipda	Pem. Letda
8.	8. Penewu	Pengatur I	II/d	Bripka	Serma
		Pengatur	II/c	Bridpol	Serka
9.	9. Lurah	Pengatur Muda I	II/b	Briptu	Sertu
		Pengatur Muda	II/a	Bripda	Serda
10.	10. Bekel	Juru I	I/d	Aj. Brip	Kopka
		Juru	I/c	Aj. Briptu Aj. Bripda	Koptu Kopda
11.	11. Jajar	Juru Muda I	I/b	Bharaka	Praka
		Juru Muda	I/a	Bharatu Bharada	Pratu Prada

Sumber: KRT Adiwongso

Pranatan Kalenggahan Angka 01/Pran/KHPP/I/2006
Bab Pangkat Abdi Dalem
27 Besar Jumakir Wawu 1938 Suryo Kaping 27 Januari 2006

Urutan	Pangkat	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		TNI	POLRI
		Pangkat	Gol		
1.	Pangeran Sentono			Jendral	Jendral
2.	Bupati Nayaka	Pembina Utama	IV/e	Letjen	Komjen
3.	Bupati Kliwon	Pem. Utm. Madya	IV/d	Mayjen	Irjen
4.	Bupati Sepuh	Pem. Utm. Muda	IV/c	Bridjen	Brigjen
5.	Bupati Anom	Pembina I	IV/b	Kolonel	Kombes
6.	Riyo Bupati Anom	Pembina	IV/a	Letkol	Ajun Kombes
7.	Wedono	Penata I	III/d	Mayor	Komisaris
8.	Kliwon	Penata	III/c	Kapten	Ajun Komisaris
9.	Lurah	Penata Muda I	III/b	Let Tu/Da	Ip Tu/Da
10.	Bekel Sepuh	Penata	III/a	Pembantu Let Tu/Da	Ajun Ip Tu/Da
11.	Bekel Anom	Pengatur	II dcba	Sersan	Brig K/Brip
12.	Jajar	Juru	I dcba	Kopral/Prajurit	Ajun Brip/ Bhara

Sumber: KRT Wasowinoto

Penutup

Dari uraian di atas maka bisa disimpulkan bahwa *peranakan* dan *serat kekancingan* merupakan media 'pendisiplinan' atau 'pengaturan' bagi para abdi dalem. Ketika mereka setuju untuk menjadi abdi dalem dengan menerima *serat kekancingan* maka mereka wajib menjalankan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepadanya seperti *sowan*, mengikuti perayaan-perayaan tertentu, mematuhi *pranatan* yang ada dan sebagainya. Selain itu dengan mengenakan pakaian *peranakan* maka secara tidak langsung mereka seolah-olah 'dibatasi' untuk berperilaku seperti filosofi pakaian *peranakan*. Ketika mereka mengenakan pakaian *peranakan* maka sudah sewajarnya jika mereka harus bertingkah polah layaknya keluarga Kraton Yogyakarta. Mereka secara tidak langsung juga ikut melestarikan nilai, norma, pranata dan etika yang selama ini berlaku di Kraton Yogyakarta meski sebenarnya mereka bukan keluarga secara 'biologis' dengan Kraton Yogyakarta. *Serat kekancingan* dan *peranakan* mampu membuat mereka-mereka yang tergabung dalam abdi dalem bertingkah dan berperilaku seperti yang diharapkan oleh Kraton Yogyakarta.

Daftar Pustaka

Buku

- Graham Burchell/Colin Gordon/Peter Miller (eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. 1991.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Haryanto, Sindung. *Edelweiss Van Jogja: Pengabdian Abdidalem Keraton Yogyakarta dalam Perspektif Sosio-Fenomenologi*. Yogyakarta: Kepel Press. 2014.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Moertono, Soemarsaid. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1985.
- Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu. 2009.
- Suwarno, P.J. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*

Sebuah Tinjauan Historis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1994.

Jurnal dan Dokumen

- Dawuh Dalem* angka 01/DD/HB.X/EHE-1932 tertanggal 29 Rejeb EHE 1932 atau 08 Nopember 1999.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Kultur Birokrasi Patrimonialisme Dalam Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Borneo* Volume 8, Nomor 2. (2012).
- Lemke, Thomas. "The Birth of Bio-Politics" – Michel Foucault's Lecture at the Collège de France on Neo-Liberal Governmentality, dalam *Economy & Society*, Vol. 30. No. 2, (2001). Hlm. 190-207.
- Pranatan Kalenggahan* angka 01/Pran/KHPP/2006 tanggal 27 Jumadil Akhir 1938 suryo kaping 27 Januari 2006.
- Pratelan urutan pangkat abdi dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat* angka 01/Pran/KHPP/2004 tanggal 15 Dulkaidah Wawu 1937 surya kaping 27 Desember 2004.
- Wasesowinoto, KRT. *Lenggahe Abdi Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat*, Minggu Pon 1 Besar Jumakir 1938. (2006).
- Wasesowinoto, KRT. *Permati Tata Lampah-tata Rakit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Pasowan-an-Parakan Padintenan Jilid 1*. (2008).
- Wasesowinoto, KRT. *Permati, Tata Lampah-tata Rakit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Pasowan-an Ngabekten Hageng Jilid 2*. (2004).

Internet

- Septi Satriani. "Punokawan dan Keprajan: Konsep Birokrasi Kerajaan dalam Keistimewaan Yogyakarta". <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/politik-lokal/394-punokawan-dan-keprajan-konsep-birokrasi-kerajaan-dalam-keistimewaan-yogyakarta.html>. Diakses pada 27 Maret 2015.
- <http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html> diakses pada tanggal 5 April 2016.
- <http://www.nu.or.id/about/paham+keagamaan> diakses pada tanggal 5 April 2016.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui aisahputrib@gmail.com.

Wasisto Raharjo Jati

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2012, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi tentang Politik Kelas, Kelas Menengah, Ekonomi-Politik, dan Gerakan Politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Dina Fadiyah

Penulis adalah staf pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Telah menyelesaikan S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Email: dinafadiyah@hotmail.com

Septi Satriani

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Lokal, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia memperoleh Gelar Sarjana dari Ilmu Politik Universitas Gajah Mada pada tahun 1999 dan Gelar Master dari Ilmu Antropoloti Universitas Gajah Mada pada tahun 2015. Ia menekuni studi politik lokal, politik sumber daya alam, dan studi konflik. Penulis dapat dihubungi melalui: septisatriani@gmail.com.

Siswanto

Penulis kelahiran Jakarta ini menamatkan S1 pada Fakultas Sospol jurusan Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 1986. Selanjutnya mengikuti Program Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, dan lulus tahun 1997. Gelar doctor diraih pada Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, pada tahun 2008. Sejak 1999 menjadi peneliti P2P-LIPI untuk menjabat Kepala Bidang Perkembangan Eropa. Sebagian besar karya ilmiah dan tulisannya membahas tentang kebijakan luar negeri AS dan hubungan Indonesia-AS. Sejak tahun 2008 sampai sekarang menjadi dosen tamu pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui sish_jakarta@yahoo.com.

Sandy Nur Ikfal Raharjo

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Indonesia. Gelar S2 diperoleh dari Universitas Pertahanan dengan tema Resolusi Konflik. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: sandy.raharjo@gmail.com.

Anggi Afriansyah

Lahir di Bekasi, 17 April 1987. Setelah menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta (2010), ia kemudian melanjutkan studi di Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia (2014). Pernah menjadi guru di SMAI Al Izhar, Pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Terbuka, Akademi Kebidanan Prima Indonesia, dan STKIP Kusuma Negara, juga pernah menjadi staf di Unit Implementasi Kurikulum (UIK) Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Saat ini merupakan Peneliti Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Anggi Afriansyah memiliki fokus kajian sosiologi pendidikan. Aktif menulis di media cetak maupun *online*. Beberapa tulisannya sudah dimuat di Koran Berita Cianjur, Jawa Pos, Koran Jakarta, Media Indonesia, Harian Republika, Lampung *Post*, Radar Bangka, Radar Tasikmalaya, Padang Ekspres, NU Online, dan gusdurian.net. Dapat dihubungi melalui afriansyah.anggi@gmail.com.

PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

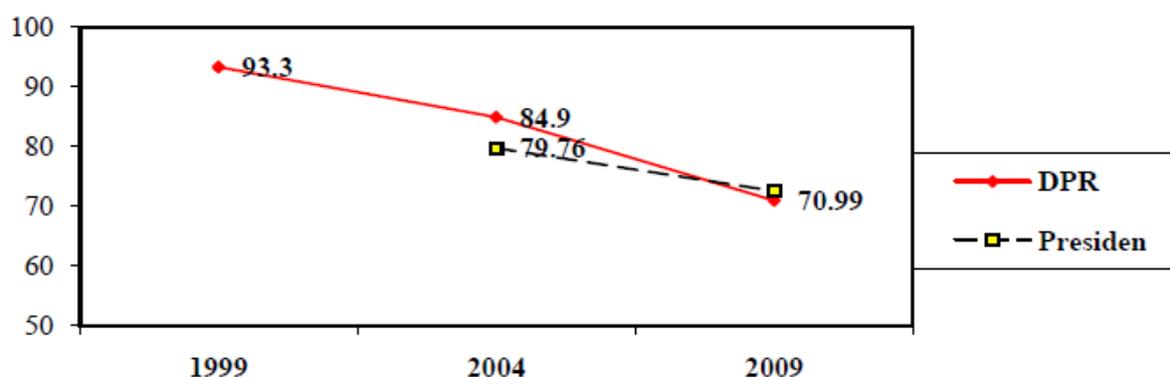
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

Tabel 1. Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah Sosialisasi agenda politik	Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Grafik 2. Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:
Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
 - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:
Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
 - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:
Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan.2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M.Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

c. Format rujukan dari laporan dan makalah:

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institute.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

d. Format rujukan dari surat kabar dan website

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

11. Pengiriman Artikel:

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi (penerbitan.p2p@gmail.com).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Fax. (021) 520 7118

13. Langganan:

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

